

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Muslan 2006, *Ketidakpatuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*, UMM Press, Malang.
- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Husni, Lalu, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khakim, Abdul, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sitorus, Abdul Rahim, Tanpa Tahun, *10 Kisah TKI dan KTKLN, Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN*, Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM), Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1989, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Wijayanti, Asri, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2012, *Sinkronisasi Hukum Perburuhan Terhadap Konvensi ILO, Analisis Kebebasan Berserikat dan Penghapusan Kerja Pakasa di Indonesia*, Penerbit Karya Putra Darwanti, Bandung.
- Yuwono, Ismantoro Dwi, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

B. Penulisan Hukum

- Butsi, Citra Berlian, “Pelaksanaan Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak TKI (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Surabaya)", *Jurnal Administrasi Publik*, Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

Hernawan, Ari dan Supriyadi, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta(PPTKIS) Dalam Pra Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri", *Penelitian Dosen*, FH UGM, Yogyakarta, 2007.

Narendra, Rafi Himawan, "Pelaksanaan Permenakertrans Nomor Per 07/Men/V/2010 Tentang Asuransi TKI Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Hak - Hak Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri", *Artikel Ilmiah*, Universitas Brawijaya, Malang, 2013 .

Siahaan, Jurnal E., "Studi Tentang Pelaksanaan Pelatihan Pegawai Kantor Ketenteraman dan Ketertiban Pemerintah DKI Jakarta", *Penulisan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.

Subhan, Hadi, "Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan Dan Purna Penempatan", *Laporan Akhir*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2012.

Wahyudi, Samsul, "Peran Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Yogyakarta Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Formal di Malaysia Yang Mengalami Kecelakaan Kerja", *Penulisan Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)

Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009).

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 258 Tahun 2007 Tentang Biaya Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia Negara Tujuan Republik Korea

Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional

Piagam PBB

D. Internet

Abdul Rahim Sitorus, <http://buruhmigran.or.id/2015/07/02/bmitki-tak-menanggung-biaya-jasa-pjtkiagensi-untuk-penempatan/>, diakses pada tanggal 7 Desember 2015, pukul 16.54 WIB.

- Abdul Rahim Sitorus, *KTKLN Untuk TKI Korsel (1)*,
http://www.kompasiana.com/rahimsitorus/ktkln-untuk-tki-korsel-1_5500dbde8133110717fa8007, diakses pada 7 Desember 2015, pukul 17.42 WIB.
- Ali Serizawa, 2014, “Pengertian Hukum Ketenagakerjaan,”
<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-hukum-ketenagakerjaan.html>, diakses pada Tanggal 16 Oktober 2015, pukul 10.52 WIB.
- BNP2TKI, <http://siskotkln.bnp2tki.go.id/>, diakses pada 16 Oktober 2015, pukul 11.50 WIB.
- BNP2TKI, 2011, “Petunjuk Penempatan TKI Perseorangan,”
<http://www.bnp2tki.go.id/read/8998/Petunjuk-Penempatan-TKI-Perseorangan.html>, diakses pada 16 Oktober 2015, pukul 11.29 WIB.
- Giri Kurniadi, 2015, “Pengertian TKI,”
<http://www.daftarpustaka.web.id/2015/04/pengertian-tki-hak-kewajiban-tki.html>, diakses pada 16 Oktober 2015, pukul 11.44 WIB.
- <http://repository.uin-suska.ac.id/826/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 November 2015, pukul 12.09 WIB.
- Hadi Muttaqin, 2013, “Definisi Tenaga Kerja,”
<http://pustakabakul.blogspot.co.id/2013/04/definisi-tenaga-kerja.html>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2015, pukul 11.19 WIB.
- Ibnu Purna, 2014, “Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) Tidak Bisa Dihapus Begitu Saja,”
http://www.kompasiana.com/ibnupurna/kartu-tenaga-kerja-luar-negeri-ktkln-tidak-bisa-dihapus-begitu-saja_54f3b6d3745513a42b6c7d, diakses pada tanggal 15 Oktober 2015, Pukul 08.45 WIB.
- Jerry Indrawan, “Buruh Migran di Asia, Kebijakan dan Praktek Dalam Ilmu Sosial,”
http://www.kompasiana.com/www.jerryindrawan.wordpress.com/buruh-migran-di-asia-kebijakan-dan-praktek-dalam-ilmu-sosial_551b5b85a33311ee21b65f02, diakses pada tanggal 26 Oktober 2015, pukul 12.07 WIB.

"Menaker Ganti KTKLN Dengan Sidik Jari biometric,"
<http://possore.com/2015/02/12/menaker-ganti-ktkln-dengan-sidik-jari-biometri/>, diakses pada tanggal 20 November 2015, pukul 22.43 WIB.

Redaksi PSD-BM, "BP3TKI Ciracas Legalkan Pungli KTKLN,"
<http://buruhmigran.or.id/2013/08/28/bp3tki-ciracas-legalkan-pungli-ktkln/>, diakses pada 1 Desember 2015, pukul 14.35 WIB.

S. Lestari, 2011, "KTKLN, Apa dan Bagaimana,"
<http://babungeblog.blogspot.co.id/2011/09/ktkln-apa-dan-bagaimana.html>, diakses pada 16 Oktober 2015, pukul 12.20 WIB.

Supriadi, 2012, "Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum ketenagakerjaan,"
<http://adhyepanrita.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum.html>, diakses pada 16 Oktober 2015, pukul 11.11 WIB.

Tegar Arief, 2015, "Januari-Mei, Jumlah TKI Bertambah 120.667 Orang,"
<http://kabar24.bisnis.com/read/20150619/15/445248/januari-mei-jumlah-tki-bertambah-120.667-orang>, diakses pada 30 September 2015, pukul 15.11 WIB.

Tegar Arief, 2015, "Pemerintah Terbitkan KTKLN Elektronik,"
<http://industri.bisnis.com/read/20150212/12/402118/pemerintah-terbitkan-ktkln-elektronik>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2015, pukul 09.24 WIB.